



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**

SKRIPSI

**ANALISIS AKUNTANSI ASET TETAP PADA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN BUNGO BERDASARKAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN
(PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2005)**

Oleh :

**TRI SEPTIANA
07953053**

Mahasiswa Program Strata Satu (S-1) Jurusan Akuntansi

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**

**PADANG
2011**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era globalisasi merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh seluruh masyarakat dunia. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintahan yang baik ditandai dengan adanya tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi adalah mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut. Sedangkan akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Perlu kita sadari bahwa pentingnya penyajian laporan keuangan pemerintah sebagai bagian dari akuntabilitas dan transparansi.

Untuk mewujudkan *good governance* diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistis. Perubahan paradigma tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta bisa memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi baik secara regional, nasional maupun internasional.

Seiring dengan reformasi dibidang keuangan negara, maka perlu dilakukan perubahan-perubahan diberbagai bidang untuk mendukung agar reformasi dibidang keuangan negara dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan dibidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-

masing. Informasi inilah yang akan menjadi alat pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang membutuhkan tersebut.

Dalam akuntansi, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan yang menyangkut organisasi pemerintahan dan organisasi-organisasi lain yang tidak bertujuan mencari laba (*non profit organization*). Mengingat pentingnya dan luasnya ruang lingkup dan aktivitas organisasi pemerintah, maka perlu dibentuk akuntansi tersendiri sebagai aktivitas layanan yang berfungsi untuk menyediakan informasi dalam rangka pengelolaan keuangan negara yang dilakukan pemerintah.

Standar akuntansi telah lama dipersyaratkan sebagai pedoman pertanggungjawaban keuangan pemerintah. Standar tersebut baru terealisasi dengan terbitnya Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang terdiri atas 11 (sebelas) pernyataan, salah satunya adalah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.07 mengenai akuntansi aset tetap.

Aset tetap merupakan salah satu bagian utama dari aktiva yang dimiliki oleh pemerintahan. Aset tetap dilingkungan komersial merupakan aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari, tidak dimaksudkan untuk dijual dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun sedangkan aset tetap dilingkungan pemerintahan merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Berdasarkan peraturan tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo yang merupakan bagian dari pemerintahan wajib mengikuti peraturan pemerintahan tersebut.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo merupakan bagian dari perangkat daerah Kabupaten Bungo yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Bungo Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk dilaporkan pada entitas pelaporan.

Dalam kegiatan operasionalnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo menggunakan aset tetap yang bernilai cukup besar. Pada tahun 2008 jumlah aset tetap yang dimiliki sebesar Rp 5.710.145.839,00, pada tahun 2009 jumlah aset tetap yang telah dimiliki meningkat menjadi Rp.5.931.348.339,00. Begitu pula pada tahun 2010, jumlah aset tetap yang dimiliki sebesar Rp 6.591.845.739,00. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo
Daftar Aset Tetap
Per 31 Desember 2008, 2009, dan 2010
(dalam rupiah)

NAMA ASET TETAP	Per 31 Desember 2010	Per 31 Desember 2009	Per 31 Desember 2008
Tanah		2.168.155.000,00	2.168.155.000,00
Gedung dan Bangunan	2.168.155.000,00	2.445.748.837,00	2.305.328.837,00
Peralatan dan Mesin	2.445.748.837,00	1.285.294.502,00	1.215.417.002,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.382.524.902,00	30.400.000,00	20.500.000,00
Aset Tetap Lainnya	593.667.000,00	1.750.000,00	750.000,00
JUMLAH ASET TETAP	6.591.845.739,00	5.931.348.339,00	5.591.655.840,00

Sumber:
Neraca
Komparatif
Dinas
Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
Kabupaten
Bungo
Tahun 2008,
2009, dan
2010

Berdasarkan observasi awal yang telah penulis lakukan, penulis menemukan beberapa permasalahan pada laporan keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo khususnya pada aset tetap. Permasalahan pertama, kendaraan dinas yang diberikan hak pakai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Bungo berupa sebuah sepeda motor

dengan nilai sebesar Rp.13.875.000,00 yang diperoleh oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo pada tahun 2008 diakui sebagai aset tetap milik dinas tersebut. Hal ini sangat tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa pengakuan aset tetap dilakukan bila aset tetap tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Kedua, pada Maret 2009 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo melakukan perbaikan atap rumah dinas yang menambah umur ekonomisnya sebesar Rp 46.541.000,00, tetapi hal ini hanya diakui sebagai biaya pemeliharaan tidak menambah umur ekonomis nilai aset tersebut. Sedangkan menurut PSAP No.07 Tahun 2005 pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Begitu pula pada permasalahan yang ketiga, pada September 2010 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo melakukan perbaikan dinding dan WC kantor yang menambah umur ekonomisnya sebesar Rp 16.310.000,00. Hal ini pun juga tidak sesuai dengan PSAP No.07 Tahun 2005, seperti yang telah disebutkan diatas.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai akuntansi aset tetap dan bermaksud untuk menuangkannya kedalam skripsi yang berjudul **“Analisis Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005)”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

”Apakah Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005)?”

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo.
2. Untuk menganalisis Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005).

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian yang penulis lakukan, penulis mengharapkan akan mampu memberikan manfaat baik bagi peneliti secara pribadi dan juga bagi masyarakat luas. Adapun manfaat penelitian yang penulis harapkan adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat meningkatkan wawasan pengetahuan penulis mengenai Akuntansi Aset Tetap ditinjau dari Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005), selain itu untuk memenuhi ujian sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

2. Bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005) dimasa yang akan datang.
3. Bagi pihak lain, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi, penambah wawasan, dan pengetahuan.

1.5 Batasan Masalah

Peneliti membatasi permasalahan dalam penelitian ini agar terfokus pada permasalahan yang ada sesuai dengan perumusan masalah diatas. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo. Data yang dibutuhkan dari penelitian ini adalah data aset tetap yang terdapat didalam Neraca Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2010.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab satu merupakan bab yang akan membahas latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Pada bab dua akan menerangkan landasan teoritis dari penelitian, kajian-kajian para pakar yang menunjang topik penelitian ini, dan review penelitian terdahulu. Selanjutnya pada bab tiga akan diuraikan mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Bab empat akan menguraikan mengenai gambaran umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo yang akan menjelaskan tentang visi dan misi organisasi, struktur organisasi, fungsi serta wewenang dari setiap bagian dalam dinas tersebut. Sedangkan pada bab lima penulis memuat analisis penerapan akuntansi aset tetap berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005)

pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo. Bab enam merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diberikan oleh peneliti.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif untuk mengetahui apakah akuntansi aset tetap pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntansi aset tetap pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005). Hal ini dibuktikan dengan adanya kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo yang memberikan pengaruh cukup besar terhadap Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo baik pada periode berjalan maupun periode selanjutnya. Kesalahan pencatatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pencatatan atas aset kendaraan dinas yang diberikan hak pakai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Bungo berupa sebuah sepeda motor dengan nilai sebesar Rp.13.875.000,00 yang diperoleh oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo pada tahun 2008 diakui sebagai aset tetap milik dinas tersebut karena aset tetap itu belum diserahkan hak kepemilikannya dan penguasaannya belum berpindah.
2. Biaya atas perbaikan atap rumah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo senilai Rp 46.541.000,00 yang menambah umur ekonomis aset tetap tersebut selama 4 tahun senilai Rp 46.541.000,00 hanya diakui sebagai biaya pemeliharaan dan tidak menambah umur ekonomis nilai aset tersebut.

3. Biaya sebesar Rp.16.310.000,00 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo untuk perbaikan dinding dan WC kantor yang menambah 3 tahun umur ekonomisnya juga hanya diakui sebagai biaya pemeliharaan yang seharusnya diakui sebagai belanja modal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana dikemukakan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan pemahaman mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga kesalahan dalam pengakuan, pencatatan, penghentian, dan pengungkapan dapat diminimalisir bahkan tidak akan terjadi kesalahan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo.
2. Dengan adanya peraturan pemerintahan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo harus lebih memperhatikan hal-hal sebagaimana disebutkan dalam peraturan pemerintah tersebut khususnya mengenai aset tetap sehingga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo dapat mengeluarkan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2007. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Djufri, A. Fahmi. 2005. *Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Jambi*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Jambi.
- Febri, Harry. 2009. *Analisis Pelaksanaan Akuntansi dan Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008*. Skripsi. Padang: Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Andalas.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Hartina, Silka. 2009. *Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Langkat*. Skripsi. Medan: Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/9406/1/09E01148.pdf> (Diakses 10 Mei 2011)
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2007. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 01/KM.12/2001
http://www.deptan.go.id/itjen/berkas_upload/kepmenkeu%20nomor%2001_km.12_2001.pdf (Diakses 1 Maret 2011).
- Muliaanra, Nanda. 2010. *Analisis Ketepatan Penyajian Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 (Studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota)*. Skripsi. Padang: Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Andalas.
- Nafarin, M. 2007. *Penganggaran Perusahaan Edisi Ketiga*. Jakarta: Salemba Empat
- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
http://www.ksap.org/peraturan/PP_71_TAHUN_2010.pdf (Diakses 21 Juni 2011)
- . Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah.
- . Peraturan Bupati Bungo Nomor 38 Tahun 2008 tentang Uraian Pokok dan Fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bungo.
- Sari, Endah Puspita. 2005. *Sistem Penarikan Aktiva Tetap Berwujud (Studi Kasus Pada PT PLN Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta)*. Skripsi. Semarang: Fakultas

Ilmu Sosial Jurusan Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
<http://www.pustakaskripsi.com/download.php?file=1021> (Diakses 16 April 2011)

Soemarso. 2005. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Salemba Empat.

Suhanda. 2007. *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Padang: Penerbit Andalas Lima Sisi.